



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan memperhatikan Diktum Kedua angka 19 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu diatur Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung.
6. Camat adalah Camat se-Kabupaten Belitung.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Belitung.
8. Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa, dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya...

upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit.

Pasal 2

Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban biaya Kesehatan

BAB III

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Germas meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja berupa kegiatan olahraga.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

(3) Untuk...

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di lingkungan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antar moda transportasi massal termasuk penyediaan *park and ride* untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Ketiga

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 6

- (1) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga mencakup 10 (sepuluh) indikator, yaitu:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok di dalam rumah.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 (delapan) indikator, yaitu:
- a. mencuci...

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. mengikuti kegiatan olahraga di sekolah;
 - e. menimbang Berat Badan dan Mengukur Tinggi Badan;
 - f. tidak merokok;
 - g. memberantas jentik nyamuk; dan
 - h. menggunakan jamban sehat.
- (4) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan tempat kerja mencakup 8 (delapan) indikator, yaitu:
- a. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - b. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - e. menggunakan air bersih;
 - f. memberantas jentik nyamuk;
 - g. menggunakan jamban sehat;
 - h. membuang sampah di tempat sampah.
- (5) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan tempat umum mencakup 8 (delapan) indikator, yaitu:
- a. menggunakan air bersih;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak meludah sembarangan tempat;
 - f. memberantas jentik nyamuk.
 - g. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun; dan
 - h. menutup makanan dan minuman.
- (6) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 (tujuh) indikator, yaitu:
- a. menggunakan air bersih;
 - b. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.

(7) Dalam...

- (7) Dalam mendorong praktik perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - i. penyediaan sarana ruang menyusui, diseminasi informasi layanan masyarakat, terkait perilaku hidup bersih dan sehat;
 - j. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - k. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 7

- (1) Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mulai kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran pangan sampai tingkat rumah tangga untuk mencapai ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat;
- (2) Kegiatan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu gizi maupun keberagamannya dengan harga yang terkendali dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- (3) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui upaya:

a. pengawasan...

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- c. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
- d. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- e. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 8

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular terkait perilaku;
 - b. melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - c. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - d. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan system rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perlu dilakukan upaya:

a. peningkatan...

- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu Penyakit Tidak Menular, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana prasarana *skrining* Penyakit Tidak Menular; dan
- c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 9

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 3, didukung dengan upaya:

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 10

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;

f. peningkatan...

- f. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan (tayangan yang tidak mendukung Germas);
- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen, meliputi:
 - a. perangkat daerah dan desa;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah daerah

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Germas terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
 - b. Wakil...

- b. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretarian Daerah Kabupaten Belitung
- c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung
- d. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
- e. Anggota : Organisasi Perangkat Daerah/Instansi/seluruh pelaku/pelaksanaan Germas.

(3) Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Forum Koordinasi Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
- (3) Forum Koordinasi Germas melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Tugas Forum Koordinasi Germas ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Koordinasi Germas Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat dengan tembusan ke Ketua Forum Koordinasi Germas Kabupaten setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Ketua...

- (3) Ketua Forum Koordinasi Germas Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seitan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Formulir pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas tercantum dalam Lampiran I dan kegiatan pelaksanaan Germas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 12



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT DI KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2024-2026

RENCANA KEGIATAN PELAKSANAAN GERMAS

NO	PENANGGUNG JAWAB	TUJUAN GERMAS	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TARGET			RENCANA WAKTU PELAKSANAAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Sekretariat Daerah	Peningkatan perilaku hidup sehat	Mendorong instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik, melaksanakan olahraga dan senam peregangan pada saat melakukan aktifitas di kantor.	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	Jan-Feb	Jan-Feb	Jan-Feb
				Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	Jan-Feb	Jan-Feb	Jan-Feb
				Jumlah instansi Pemerintah daerah yang menyediakan sarana ruang ASI.	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	Jan-Feb	Jan-Feb	Jan-Feb
				Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	Jan-Feb	Jan-Feb	Jan-Feb
				Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Akses Disabilitas	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	Jan-Feb	Jan-Feb	Jan-Feb

				Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan konsumsi gizi seimbang (ada buah dan sayur) dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	1 Surat Edaran	Jan-Feb	Jan-Feb	Jan-Feb
			Memfasilitasi peningkatan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Kabupaten Belitung	Jumlah Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) Kecamatan yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jan - des	Jan - des	Jan - des
				Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M di Kabupaten/Kota.	100%	100%	100%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan perilaku hidup sehat	Menyusun kebijakan di tingkat daerah	Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Belitung	1 Peraturan Bupati			Februari		
			Koordinasi dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Belitung	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Per semester	Per semester	Per semester
			Menyusun laporan tahunan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Dokumen laporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Belitung	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Feb	Feb	Feb
3	Dinas Kesehatan	Peningkatan edukasi hidup sehat	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah kecamatan (5 kecamatan) dan 42 desa dan 7 kelurahan yang melaksanakan minimal 3 (tiga) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaporkan hasil pelaksanaannya (gemar makan sayur dan buah, periksa kesehatan secara berkala, melakukan aktifitas fisik)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jan - des	Jan - des	Jan - des

Peningkatan perilaku hidup sehat	Advokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Ditetapkannya Perbup KTR	1 Peraturan			Jan -Juni		
		Persentase perkantoran dan Tempat Tempat Umum yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	40%	50%	80%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
	Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu aktif	80%	90%	100%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
		Persentase Kader Posyandu yang telah mendapatkan pelatihan 25 kompetensi dasar	75%	100%	100%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
		Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat sesuai dengan Norma Standart Prosedur Kriteria Kesehatan	100%	100%	100%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
	Peningkatan aktivitas fisik	Sosialisasi gemar beraktivitas fisik	Persentase kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik	80%	90%	100%	Jan - des	Jan - des
Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif	Persentase petugas kesehatan yang menjadi konselor ASI (Air Susu Ibu)	60%	80%	100%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
		Persentase kegiatan kampanye ASI eksklusif	80%	80%	100%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
		Persentase kegiatan kampanye gizi seimbang	80%	80%	100%	Jan - des	Jan - des	Jan - des
Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Deteksi dini penyakit	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Penyakit Tidak Menular dan kanker payudara serta leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun	9 Puskesmas	9 Puskesmas	9 Puskesmas	Jan - des	Jan - des	Jan - des
		Pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jan - des	Jan - des	Jan - des
Peningkatan kualitas lingkungan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	40%	50%	60%	Jan - des	Jan - des	Jan - des

4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Peningkatan aktivitas fisik	Kampanye gemar olahraga	Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata	11.000 peserta / tahun	14.000 peserta / tahun	15.000 peserta / tahun	Setiap bulan	Setiap bulan	Setiap bulan
			Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	5 event	6 event	8 event	Tw I-IV	Tw I-IV	Tw I-IV
			Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi	150 unit	150 unit	150 unit	Setiap bulan	Setiap bulan	Setiap bulan
				Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus	3 kejuaraan	4 kejuaraan	5 kejuaraan	Tw II-IV	Tw II-IV	Tw II-IV
				Fasilitasi sanggar/klub senam untuk berkontribusi dalam pelaksanaan aktifitas fisik di Kabupaten Belitung	44 kali	44 kali	44 kali	Setiap bulan	Setiap bulan	Setiap bulan
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan edukasi hidup sehat	Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan	13 Sekolah	14 Sekolah	15 Sekolah	Maret/Okt	Maret/Okt	Maret/Okt
		Peningkatan perilaku hidup sehat	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah	Jumlah sekolah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	29 Sekolah	29 Sekolah	29 Sekolah	Maret/Okt	Maret/Okt	Maret/Okt

			Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)	29 Sekolah	29 Sekolah	29 Sekolah	Maret/Okt	Maret/Okt	Maret/Okt
			Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	29 Kegiatan	29 Kegiatan	29 Kegiatan	Maret/Okt	Maret/Okt	Maret/Okt
		Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah	29 Satuan pendidikan	29 Satuan pendidikan	29 Satuan pendidikan	Maret/Okt	Maret/Okt	Maret/Okt
				Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah	29 Satuan pendidikan	29 Satuan pendidikan	29 Satuan pendidikan	Maret/Okt	Maret/Okt	Maret/Okt
		Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah	29 Satuan pendidikan	29 Satuan pendidikan	29 Satuan pendidikan	Maret/Okt	Maret/Okt	Maret/Okt
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan dan mutu pangan pangan segar yang efektif	16 kali	16 kali	16 kali	Jan - des	Jan - des	Jan - des

			Fasilitasi pemanfaatan perkarangan untuk menanam sayur dan buah	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan perkarangan untuk menanam sayur dan buah	-	5 desa lokus stunting	5 desa lokus stunting	-	Jan - des	Jan - des
			Penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang dihasilkan	1 lap	1 lap	1 lap	Jan - des	Jan - des	Jan - des
7	Dinas Perikanan	Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan Perizinan Berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	75 Unit Usaha)	75 Unit Usaha)	75 Unit Usaha)	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	2 Ton	2 Ton	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
8	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Rekomendasi/izin Site Plan Perumahan	Dokumentasi Site Plan/ fasilitasi penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di komplek perumahan	3 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
			Pemeliharaan taman	Fasilitasi ketersediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	24 taman	24 taman	24 taman	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
			Pengembangan taman	Luasan taman yang terpelihara	1,1 Ha	1,1 Ha	1,1 Ha	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des

			Fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada Fasilitas Umum							
			- Penyediaan sarana dan prasarana air minum	Jumlah sarana dan prasarana air minum	945 SR	1086 SR	1186 SR	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
			- Pembangunan drainase permukiman	Panjang saluran drainase permukiman	5400 m'	5400 m'	5400 m'	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
			- Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi	Sarana dan prasarana sanitasi	250 KK	250 KK	250 KK	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
9	Dinas Perhubungan	Peningkatan Aktivitas Fisik	Penataan Sarana dan Fasilitas Perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	192 unit	1100 unit	1100 unit	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
			Konektivitas antar transportasi massal termasuk "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah Fasilitas antar moda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki	2 unit	2 unit	2 unit	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas	8 kali	8 kali	8 kali	Juli - Des	Juli - Des	Juli - Des
10	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Mengendalikan pencemaran badan air	Terawasinya Instalasi Air Limbah (IPAL)	15 obyek	16 obyek	17 obyek	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des

			Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah	5.084 ton/tahun	5.762 ton/tahun	6.465 ton/tahun	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
			Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas yang di turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan	5 komunitas	5 komunitas	5 komunitas	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Penghargaan Adipura	-	Plakat Adipura	Plakat Adipura	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Jumlah peserta bimtek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat	-	120 orang	120 orang	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Belitung	37 sekolah	37 sekolah	37 sekolah	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	Peningkatan perilaku hidup sehat	Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alkohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk minuman beralkohol	20 Kali	20 Kali	20 Kali	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des

				Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan barang yang bersubsidi dan barang penting lainnya	30 Kali	30 Kali	30 Kali	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan edukasi hidup sehat	Diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami masyarakat	6 pesan	6 pesan	12 pesan	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
13	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Promosi penggerakkan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah Kelompok promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko, PTM (PUSPA, KOMDA, LANSIA, GOW, P2TP2A, LK3, LSMPP)	7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		Peningkatan edukasi hidup sehat	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	jumlah kelompok KIE Gerakan Masyarakat Sehat (IR Perempuan, PUG, Forum Anak, P2TP2A, PUSPAGA, PUSPA, PATBM)	25 Kelompok	25 Kelompok	25 Kelompok	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			Sosialisasi Germas oleh Pendamping PKH	Jumlah Sosialisasi Germas oleh Pendamping PKH	5 Kecamatan (19 orang)	5 Kecamatan (19 orang)	5 Kecamatan (19 orang)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
		Peningkatan perilaku hidup sehat	Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Cakupan BPNT dan PKH	- 5 Kecamatan - BPNT = 7500 KPM dan - PKH = 4097 KPM)	5 Kecamatan (BPNT = 7500 KPM dan PKH = 4097 KPM)	5 Kecamatan (BPNT = 7500 KPM dan PKH = 4097 KPM)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

		Peningkatan kualitas lingkungan	Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah akibat bencana	penanganan bencana oleh TAGANA	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
14	Loka POM	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	Jumlah desa pangan aman	6 desa	6 desa	6 desa	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	4 pasar	4 pasar	4 pasar	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
			Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	93 sekolah	93 sekolah	93 sekolah	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
15	BPJS Kesehatan	Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit	Pelayanan Promotif dan Preventif untuk Peserta Program JKN termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah Pencegahan Sekunder dan Pelayanan Promotif dan Preventif dalam Paket JKN termasuk upaya pencegahan sekunder deteksi dini penyakit	28.000 Pengecekan Skrining Riwayat Kesehatan	28.000 Pengecekan Skrining Riwayat Kesehatan	28.000 Pengecekan Skrining Riwayat Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
					50 peserta Pemeriksaan Papsmear	50 peserta Pemeriksaan Papsmear	50 peserta Pemeriksaan Papsmear	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

					Kegiatan PRB PROLANIS: Edukasi 100 kegiatan, Senam 400 kegiatan	Kegiatan PRB PROLANIS: Edukasi 100 kegiatan, Senam 400 kegiatan	Kegiatan PRB PROLANIS: Edukasi 100 kegiatan, Senam 400 kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan edukasi hidup sehat	Promosi dan Konseling kesehatan reproduksi pada kelompok kegiatan (Poktan) Bina Keluarga, Sasilitas Kesehatan (Faskes) dan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	Presentase Poktan yang Mendapatkan informasi kesehatan Reproduksi	100%	100%	100%	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Prentase faskes yang melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak hak reproduksi di kabupaten	100%	100%	100%	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif mendapatkan pembinaan	47 Kelompok PIK-R	50 Kelompok PIK-R	53 Kelompok PIK-R	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
			penggerakan pelayanan KB MKJP	Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangkapanjang (IUD , Implant,MOP,MOW)	3.865 Akseptor	4.135 Akseptor	4.424 Akseptor	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
17	Dinas Pariwisata	Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Daya tarik wisata yang terkelola dengan baik (adanya toilet/sarana sanitasi layak)	77,65%	80%	82,35%	Juli-Des	Juli-Des	Juli-Des

18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk pangan IKM	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang di bina	100 IKM	200 IKM	300 IKM	TW II dan III	TW II dan III	TW II dan III
			Meningkatkan Kualitas Produk IKM	Jumlah Produk IKM yang tersertifikasi	30 produk	30 produk	30 produk	TW III	TW III	TW III
19	Badan Narkotika Nasional	Peningkatan edukasi hidup sehat	Diseminasi informasi P4GN untuk pelajar/mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba	2 desa (100%)	2 desa (100%)	2 desa (100%)	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
				Terselenggaranya test urine kepada seluruh ASN	6% total seluruh ASN	6% total seluruh ASN	6% total seluruh ASN	Jan - Des	Jan - Des	Jan - Des
20	Kementerian Agama	Peningkatan Edukasi Hidup Sehat	Bimbingan Kesehatan Pranikah	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah	450 Pasang / 900 Orang	600 Pasang / 1200 Orang	750 Pasang / 1500 Orang	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran
		Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Penguatan UKS di Madrasah	Jumlah Madrasah yang memiliki standar UKS yang baik	8 madrasah	8 madrasah	8 madrasah	Feb s/d Nov	Feb s/d Nov	Feb s/d Nov
			Penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Madrasah	Jumlah Madrasah yang menerapkan KTR	8 madrasah	8 madrasah	8 madrasah	Maret s/d Mei	Maret s/d Mei	Maret s/d Mei
			Penguatan Pos Kesehatan Pesantren	Jumlah Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren)	9 pesantren	9 pesantren	9 pesantren	Feb s/d Des	Feb s/d Des	Feb s/d Des

		Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah	Jumlah Madrasah yang memiliki sarana olahraga	8 madrasah	8 madrasah	8 madrasah	Maret s/d Juni	Maret s/d Juni	Maret s/d Juni
				Jumlah Madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah	8 madrasah	8 madrasah	8 madrasah	Feb s/d Des	Feb s/d Des	Feb s/d Des
		Peningkatan Kualitas Lingkungan	Fasilitasi Rumah Ibadah Sehat	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat	323 rumah ibadah	323 rumah ibadah	323 rumah ibadah	Feb s/d Des	Feb s/d Des	Feb s/d Des
			Penyediaan sarana sanitasi di madrasah	Jumlah Madrasah yang memiliki sarana sanitasi	8 madrasah	8 madrasah	8 madrasah	Juli s/d Nop	Juli s/d Nop	Juli s/d Nop
21	Kecamatan Membalong	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Penguatan Partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	Feb s/d Des	Feb s/d Des	Feb s/d Des
				Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dalam rangka pencegahan peningkatan kasus Demam Berdarah	1 Edaran	1 Edaran	1 Edaran	Feb dan Nov	Feb dan Nov	Feb dan Nov
			Penguatan upaya kesehatan sekolah	Monitoring , Evaluasi dan pembinaan UKS ke Sekolah dalam rangka lomba UKS TK Kecamatan/Kabupaten	1 laporan	1 laporan	1 laporan	April	April	April

				Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah	80%	80%	80%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
				Pembinaan/Sosialisasi ke Sekolah terkait Penurunan angka pernikahan di bawah umur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	September	September	September
				Persentase Desa yang ODF	90%	100%	100%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
22	Kecamatan Sijuk	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
		Peningkatan kualitas lingkungan	Penyehatan lingkungan	Persentase Desa yang ODF	80%	100%	100%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
23	Kecamatan Badau	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Penguatan Partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	Feb s/d Des	Feb s/d Des	Feb s/d Des
			Penguatan upaya kesehatan sekolah	Monitoring , Evaluasi dan pembinaan UKS ke Sekolah dalam rangka lomba UKS TK Kecamatan/Kabupaten	1 laporan	1 laporan	1 laporan	April	April	April
				Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah	70%	70%	70%	September	September	September

				Persentase Desa yang ODF	90%	100%	100%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
24	Kecamatan Selat Nasik	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Penguatan Partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	Feb s/d Des	Feb s/d Des	Feb s/d Des
			Penguatan upaya kesehatan sekolah	Monitoring , Evaluasi dan pembinaan UKS ke Sekolah dalam rangka lomba UKS TK Kecamatan/Kabupaten	1 laporan	1 laporan	1 laporan	April	April	April
				Pembinaan/Sosialisasi ke Sekolah terkait Penurunan angka pernikahan di bawah umur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	September	September	September
			Peningkatan Kualitas Lingkungan	Persentase Desa yang ODF	75%	100%	100%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
			Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	Jan-Des	Jan-Des
25	Kecamatan Tanjungpandan	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat	Penguatan Partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des

			Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dalam rangka pencegahan peningkatan kasus Demam Berdarah	1 Edaran	1 Edaran	1 Edaran	Feb dan Nov	Feb dan Nov	Feb dan Nov
			Penguatan upaya kesehatan sekolah	Monitoring , Evaluasi dan pembinaan UKS ke Sekolah dalam rangka lomba UKS TK Kecamatan/Kabupaten	1 laporan	1 laporan	1 laporan	April	April	April
				Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah	80%	80%	80%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
				Pembinaan/Sosialisasi ke Sekolah terkait Penurunan angka pernikahan di bawah umur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des
				Persentase Desa yang ODF	90%	100%	100%	Jan-Des	Jan-Des	Jan-Des

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004